

## BAB 1. SIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Simpulan

Dari kedua analisa yang telah dilakukan, ditemukan hasil prioritas penanganan yang berbeda, karena dengan memakai metode AHP mempertimbangkan aspek/kriteria tertentu dalam penentuan bobot hasil persepsi responden dan penilaian menentukan prioritas penanganan jalan. Disamping itu background dari Responden juga sangat mempengaruhi hasil pembobotan. Lain halnya dengan menentukan prioritas penanganan berdasarkan SK No. 77 Dirjen Bina Marga Tahun 1990, dimana penilaian NPV/Km yang tertinggi mendapatkan prioritas penanganan utama.

#### 1.1.1 Hasil Penelitian Berdasarkan Metode AHP

Ruas jalan prioritas pertama untuk jalan arteri sekunder dan kolektor di Kota Solok pada ruas Jalan Simpang Sigege – Ampang Kualo dengan nilai 0,907 jenis penanganannya peningkatan, prioritas kedua pada ruas Jalan SMP 1 – Simpang Damar dengan nilai 0,602 jenis penanganan pemeliharaan berkala sedangkan prioritas terakhir pada ruas Jalan Simpang BRI – Simpang Tanjung Paku dengan nilai 0,427 dengan penanganan pemeliharaan rutin. Seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Prioritas	Kode Ruas	Nama Ruas	Nilai	Penanganan
1	051	Jl. Simp. Sigege - Ampang Kualo	0,907	Peningkatan
2	047	Jl. SMP 1 - Simpang Damar	0,602	Berkala
3	054	Simp. Laing - Batas Kota Damar	0,583	Berkala
4	046	Jl. Mesjid Kp. Jawa - Jemb. Laing Taluk	0,580	Berkala
5	056	Jl. Jembatan Laing - Laing Pasir	0,570	Peningkatan
6	033	Jl. Simp. Lampu Merah Pandan - Tj. Paku	0,541	Rutin
7	064	Jl. Lintasan KA - Ktr Lurah Lama Kp. Jawa	0,432	Rutin
8	034	Jl. Simp. BRI - Simp. Tanjung Paku	0,427	Rutin

### 1.1.2 Hasil Penelitian Berdasarkan SK No. 77 Dirjen Bina Marga Tahun 1990, Dirjen Bina Marga

Berdasarkan nilai NPV tertinggi, prioritas utama penanganan jalan arteri sekunder dan kolektor di Kota Solok yaitu pada ruas Jalan Simpang BRI – Simpang Tanjung Paku dengan jenis penanganan pemeliharaan rutin. Ini berbanding terbalik dengan hasil prioritas penanganan dengan metode AHP, dimana ruas Jalan Simpang BRI - Simpang Tanjung Paku tersebut menjadi prioritas terakhir.

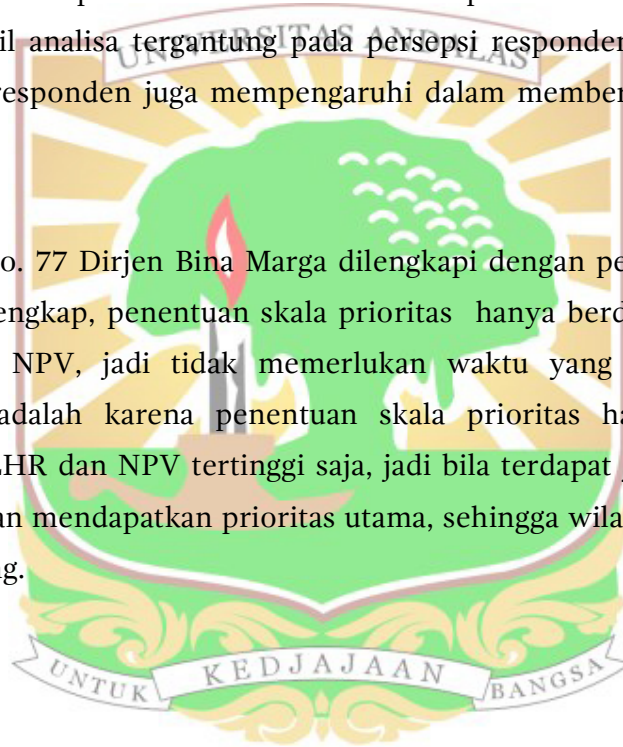
Prioritas penanganan kedua pada ruas Jalan Simpang Lampu Merah Pandan - Tanjung Paku dengan jenis penanganan juga pemeliharaan rutin, dimana ruas tersebut juga bukan menjadi prioritas tiga besar dalam metode AHP. Sedangkan prioritas ke tiga pada ruas Jalan Masjid Kampung Jawa - Jembatan Laing Taluk dengan jenis penanganan pemeliharaan berkala. Yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Prioritas	No. Ruas	Nama Ruas	Nilai Manfaat (Jt/Km)	Biaya Pekerjaan (Jt/Km)	NPV (Jt/Km)	Jenis Penanganan
1	034	Jl. Simp. BRI - Simp. Tanjung Paku	3200	4,32	3195,7	Rutin
2	033	Jl. Simp. Lampu Merah Pandan - Tj. Paku	3872	803,6	3068,4	Rutin
3	046	Jl. Masjid Kp. Jawa - Jemb. Laing Taluk	2608	1230	1378	Berkala
4	054	Simp. Laing - Batas Kota Damar	1644	720	924	Berkala
5	064	Jl. Lintasan KA - Ktr Lurah Lama Kp. Jawa	771	1,44	769,6	Rutin
6	051	Jl. Simp. Sigege - Ampang Kualo	2630	1920	710	Peningkatan
7	047	Jl. SMP 1 - Simpang Damar	2035	1620	415	Berkala
8	056	Jl. Jembatan Laing - Laing Pasir	770	32.000	(2430)	Peningkatan

### 1.1.3 Kelebihan dan kelemahan penentuan skala prioritas penanganan jalan memakai metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan memakai Penanganan Teknis SK 77/KPTS/Db/1990 Dirjen Bina Marga

Kelebihan metode AHP ini antara lain dapat mengkombinasikan berbagai kriteria dan sub kriteria yang dilakukan dengan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan, AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami dan mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaiannya. Sedangkan kelemahannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama karena dalam pemilihan dan penyebaran responden melibatkan beberapa stakeholders dan tokoh masyarakat, hasil analisa tergantung pada persepsi responden dan background pekerjaan dari responden juga mempengaruhi dalam memberikan pembobotan dan penilaian.

Kelebihan SK No. 77 Dirjen Bina Marga dilengkapi dengan petunjuk teknis dan panduan yang lengkap, penentuan skala prioritas hanya berdasarkan tingginya nilai LHR dan NPV, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kelemahannya adalah karena penentuan skala prioritas hanya berdasarkan tingginya nilai LHR dan NPV tertinggi saja, jadi bila terdapat jalan dengan LHR rendah tidak akan mendapatkan prioritas utama, sehingga wilayah tersebut tidak akan berkembang.



## 1.2 Saran

1. Responden yang dilibatkan dalam metode AHP harus yang berkompeten dan memiliki jawaban yang konsisten, agar hasilnya pun konsisten dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya mempertimbangan penggunaan metode AHP dalam menetapkan prioritas penanganan jalan, karena metode ini dapat mengkombinasikan berbagai aspek dan kriteria yang dilakukan dengan pembobotan sesuai tingkat kebutuhan daerah.